

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa dan daerah pedesaan. Apabila dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di desa dan di kota lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa. Sudah seharusnya pusat perhatian dalam upaya pembangunan ditujukan kepada masyarakat desa. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menegaskan keberadaan desa dalam tata negara Indonesia. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya sesuai potensi dan budaya tersendiri di dalamnya, setidaknya pembangunan era pemerintahan saat ini dapat memberi dorongan sehingga desa berkembang menjadi kota, peri kehidupan desa berubah menjadi kehidupan kota. Seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di desa-desa di seluruh tanah air, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah berdiri tegak.

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 telah mengatur tentang berbagai kebijakan perekonomian desa yang dapat mendorong masyarakat desa lebih aktif untuk dapat membangun desanya. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan desa yang dapat mandiri dan berdaya. Berkaitan dengan salah satu dari program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional

akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, karena desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa, maka pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu dilakukanya pembangunan desa. Pemerintah pada saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termuat dalam undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa.

Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Namun saat ini masih sangat minim sekali desa yang dapat mengembangkan potensinya. Hal ini dikarenakan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah menyebabkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemamkmuran masyarakat.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Disusunlah strategi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian desa. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dalam buku “Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020”, Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 984,52 km<sup>2</sup> atau 2,78% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon memiliki penduduk yang berjumlah 2.189.785 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.108.513 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.081.272 jiwa. Kabupaten Cirebon memiliki presentase kemiskinan dan pengangguran yang bisa dikatakan tidak

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN  
CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sedikit. Dengan jumlah penduduk 2.189.785 jiwa ada sekitar 10,28% pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017-2019 dan 10,06% kemiskinan di Kabupaten Cirebon atau sekitar 247.000 masyarakat miskin, atau rata-rata ada sekitar 6.175 masyarakat miskin per kecamatan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020. Menurut Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Cirebon 2015 – 2019, Kabupaten Cirebon memiliki 40 Kecamatan dengan 424 Desa. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon ialah Kecamatan Beber. Kecamatan Beber memiliki luas wilayah 23,25 km<sup>2</sup> atau 2,35% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.304 jiwa dan 19.974 penduduk perempuan. Kecamatan Beber memiliki 10 Desa diantaranya Beber, Ciawigajah, Cikancas, Cipinang, Halimpu, Kondangsari, Patapan, Sindanghayu, Sindangkasih dan Wanayasa.

Melihat data kemiskinan dan pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama pada wilayah Kecamatan Beber yang mana menurut Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Wilayah Kecamatan Beber merupakan salah satu yang termasuk kedalam 10 kecamatan termiskin yang ada di Kabupaten Cirebon. BUMDes bisa menjadi salah satu jalan untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan dan perlahan membantu perekonomian desa dengan tujuan akhirnya memberikan keahlian kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan berbagai macam cabang usaha dan berujung pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto dalam (Widiastuti, 2015 hlm. 39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat tentu memerlukan pendampingan dan pendidikan agar menggugah kesadaran serta motivasi yang harus dibangun oleh beberapa pihak terkait.

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Mardikanto dalam (Saepudin dkk., 2023 hlm. 150) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang berusaha yang dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat, hingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep pemberdayaan masyarakat pun erat kaitannya dengan konsep pendidikan masyarakat, Sudiapermana (2021, hlm. 41) menyatakan bahwa konsep pendidikan masyarakat menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki faktor-faktor unik yang harus diperhatikan, termasuk pengorganisasian masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat tersebut. Pendidikan masyarakat pula dapat di definisikan sebagai proses pendidikan komunal menuju pemberdayaan, baik pada tingkat individu maupun kolektif.

Dengan beberapa potensi yang ada di desa Ciawigajah, tentu pemanfaatan BUMDes guna dapat mencapai pemberdayaan masyarakat masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa ini masih memerlukan inovasi-inovasi dengan menciptakan unit-unit usaha baru agar bisa merekrut masyarakat Desa Ciawigajah lebih banyak lagi sehingga semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan BUMDes. Terlebih dengan program unit usaha baru yang sedang digagas dan dibangun oleh BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa yang sedang menggarap unit usaha agrowisata bernama Sarongge yang rencananya akan mulai dibuka untuk umum pada awal tahun 2024, tentu memerlukan strategi pengelolaan agar unit usaha baru ini dapat memaksimalkan pendapatan asli Desa Ciawigajah.

Untuk dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada di Desa Ciawigajah dan demi mencapai target yang telah ditentukan serta mengurangi resiko ancaman maka keberlangsungan pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa memerlukan pendampingan lebih lanjut. Salah satu tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN  
CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lahirnya undang-undang desa tentu tidak baik bila penempatan sumberdaya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar dari aturan yang berlaku. Efektifitas keberjalanan pendampingan desa oleh para pendamping harus dimaksimalkan karena menjadi ujung tombak dalam pembangunan desa.

Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Seperti yang diketahui di beberapa desa, BUMDes hanya menjadi simbolis saja, tidak dimaksimalkan dengan baik untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun tidak dengan Desa Ciawigajah, pihak pemerintah desa melakukan upaya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat dengan mengelola kewirausahaan desa, yaitu BUMDes. BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa beridiri sejak 2015. Pemerintah Desa Ciawigajah mendirikan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa sebagai wadah untuk mengelola potensi yang ada di desa dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes Desa Ciawigajah juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkembang lebih besar lagi, sebelumnya BUMDes Desa Ciawigajah pernah menjadi BUMDes terbaik tingkat Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa yang telah berhasil memberi lapangan pekerjaan baru bagi 50 anggotanya dan melihat pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes yang saat ini telah mencapai Rp. 450.000.000/tahun, yang hal tersebut masih ingin ditingkatkan oleh para perangkat Desa Ciawigajah yang masih memiliki ambisi menghasilkan pendapatan asli desa hingga Rp. 3.000.000.000/tahun.

Unit usaha yang menjadi andalan BUMDes Desa Ciawigajah adalah produksi

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN  
CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

air mineral dengan merek dagang Ciawi Water. Pabrik Ciawi Water mampu menghasilkan kapasitas produksi 570 dus dalam waktu 1 *shift* yang berdurasi 8 jam. Keberadaan AMDK Ciawi Water merupakan wujud implementasi kerja bersama antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dengan masyarakat. Melihat segmen pasar yang menjanjikan, maka pemerintah desa bersama-sama dengan BUMDes, mendorong untuk memproduksi air mineral. Selain itu, BUMDes Desa Ciawigajah juga sedang gencar-gencarnya mendongkrak unit usaha pengelolaan sampah yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik hingga menjadikan Desa Ciawigajah menjadi desa pertama yang mampu menanggulangi masalah pengolahan sampah hingga menjadikan Desa Ciawigajah menjadi Desa Percontohan di Kabupaten Cirebon. Disamping itu, BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa juga memiliki unit usaha lain seperti: Peternakan, Pertanian, Perdagangan, Koperasi, dan Agrowisata.

Dengan adanya peluang dana APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat dan adanya program BUMDes ini sendiri tentunya lebih membuka peluang bagi kemajuan desa yang berimbas pada naiknya indeks perekonomian nasional. Namun keberlangsungan BUMDes di desa sendiri tentunya memerlukan pendampingan yang serius dari pendamping desa baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan agar BUMDes di desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memajukan desa tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu hasil penelitian oleh Nurul Septyani dalam pemenuhan syarat memperoleh gelar S1 yang dilakukan pada 2017 dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon” penelitian tersebut berisi tentang pembahasan peran dari badan usaha milik desa yang ada di Desa Ciawigajah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Desa Ciawigajah dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BUMDes Desa Ciawigajah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ciawigajah melalui beberapa unit usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Ciawigajah. Namun, dalam penelitian tersebut didapatkan temuan bahwa peran

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN  
CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat dalam pengelolaan BUMDes ini belum maksimal dan dialog antara pemerintah desa dan masyarakat secara luas dirasa belum maksimal dikarenakan kurang berjalannya peran pihak ketiga selaku penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti peran pendamping desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ciawigajah agar program BUMDes tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran dari pendamping desa dalam melakukan pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa.

Penelitian selanjutnya yang dirasa relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Niki Abdul Muas dalam pemenuhan syarat memperoleh gelar S1 yang dilakukan pada 2022 lalu dengan judul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus”. Dari hasil tersebut ditemukan bahwa pendamping desa di Desa Pekon Pulau Panggung telah melaksanakan perannya dengan sangat baik, baik peran sebagai narasumber, fasilitator, mediator, pelatih maupun penggerak, sehingga dapat memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang ada di Desa Pekon Pulau Panggung dan pengelolaan BUMDes di desa Pekon Pulau Panggung berhasil berjalan secara maksimal yang berdampak pada meningkatnya perekonomian di desa tersebut. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian tentang peran pendamping Desa dalam pengelolaan BUMDes Desa Ciawigajah dalam upaya peningkatan pendapatan asli Desa Ciawigajah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Niki Abdul Muas masih mencari peranan apa saja yang dilakukan oleh pendamping desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Pekon Pulau Panggung, namun penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada peran yang dilakukan oleh pendamping desa dalam pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Identifikasi masalah dilakukan sebelum peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah diurai sebagai berikut:

1. BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa masih memerlukan inovasi untuk menciptakan unit-unit usaha baru agar bisa merekrut lebih banyak masyarakat Desa Ciawigajah.
2. Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Ciawigajah.
3. Pemerintah Desa Ciawigajah masih ingin meningkatkan pendapatan asli Desa Ciawigajah dengan target pendapatan Rp. 3.000.000.000/tahun

Dari uraian yang dipaparkan pada identifikasi masalah, penulis membatasi permasalahan penelitian terkait dengan peran pendamping desa dalam pengelolaan program BUMDes dalam upaya peningkatan pendapatan asli Desa Ciawigajah, maka penulis merumuskan ke beberapa bentuk pertanyaan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pengelolaan program BUMDes Desa Ciawigajah?
2. Bagaimana strategi pendamping desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Desa Ciawigajah?
3. Apa saja faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program BUMDes desa Ciawigajah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peran pendamping desa dalam pengelolaan program BUMdes Desa Ciawigajah.
2. Mendeskripsikan strategi pendamping desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Desa Ciawigajah
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan progtram BUMDes Des Ciawigajah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memberikan manfaat serta berguna secara teoritis maupun praktis bagi penulis sendiri pada khususnya dan untuk pemberdayaan masyarakat pada umumnya, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan saran dan sumbangsih keilmuan tentang pendidikan masyarakat yang berujung pada pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kemampuan analisa berfikir mengenai cakupan yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan BUMDes.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah wawasan keilmuan terkait peran pendamping desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan BUMDes.

## 1.5 Stuktur Organisasi Skripsi

Struktur penulisan skripsi mengacu kepada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (2023:15) dengan susunan sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

### BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori serta konsep yang dijadikan sebagai landasan serta memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan temuan penelitian yang didasarkan kepada hasil

Dony Budyarso , 2024

**PERAN PENDAMPING DESA PADA PENGELOLAAN PROGRAM BUMDES DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN  
CIREBON**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **BAB V: Penutup**

Bab ini menguraikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

